

Konsep dan Urgensi Pancasila Sebagai Sistem Etika

Cindy Azkhya¹, Zahara Lutfya², Anisa Purnama Sari³, Bambang Trisno⁴
^{1,2,3,4}UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Abstract. *Pancasila, as the basis of the Indonesian state, not only acts as a constitution but also as an ethical system that underlies national and state life. In the midst of the challenges of globalization and modernization, the values of Pancasila are experiencing significant tests. This article explores the concept and urgency of Pancasila as an ethical system, highlighting the reasons for the need for Pancasila as a moral guide in everyday life. Through historical, sociological and political approaches, this article analyzes the dynamics and challenges faced by Pancasila as an ethical system. A deep understanding of the essence of Pancasila as a source of values and the urgency of its existence in shaping national character is the main focus of the discussion.*

Keywords: *Pancasila, ethical system, national life, constitution, moral values.*

Abstrak. Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, tidak hanya berperan sebagai konstitusi tetapi juga sebagai sistem etika yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah tantangan globalisasi dan modernisasi, nilai-nilai Pancasila mengalami ujian yang signifikan. Artikel ini mengeksplorasi konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika, menyoroti alasan perlunya Pancasila sebagai panduan moral dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pendekatan historis, sosiologis, dan politis, artikel ini menganalisis dinamika serta tantangan yang dihadapi Pancasila sebagai sistem etika. Pemahaman mendalam terhadap esensi Pancasila sebagai sumber nilai dan urgensi keberadaannya dalam membentuk karakter bangsa menjadi fokus utama pembahasan.

Kata Kunci: Pancasila, sistem etika, kehidupan berbangsa, konstitusi, nilai-nilai moral.

LATAR BELAKANG

Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, memiliki peran fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila tidak hanya menjadi landasan konstitusional, tetapi juga menjadi pedoman moral dan etika bagi seluruh rakyat Indonesia.

Di era globalisasi dan modernisasi saat ini, nilai-nilai Pancasila semakin diuji. Perkembangan teknologi informasi yang pesat, perubahan sosial budaya yang cepat, dan berbagai tantangan lainnya dapat menggerus nilai-nilai luhur Pancasila.

Oleh karena itu, penting untuk memahami dan menerapkan Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai sistem etika berarti menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar untuk menilai baik dan buruknya suatu tindakan.

Rumusan Masalah

1. Apa Alasan Diperlukannya Pancasila Sebagai Sistem Etika?
2. Apa Sumber Historis, Sosiologis, Politis Tentang Pancasila Sebagai Sistem Etika?
3. Bagaimana Dinamika Dan Tantangan Pancasila Sebagai Sistem Etika?
4. Bagaimana Esensi Dan Urgensi Pancasila Sebagai Sistem Etika?

Tujuan Masalah

- a. Untuk Mengetahui Alasan Diperlukannya Pancasila Sebagai Sistem Etika.
- b. Untuk Mengetahui Sumber Historis, Sosiologis, Politis Tentang Pancasila Sebagai Sistem Etika.
- c. Untuk Mengetahui Dinamika Dan Tantangan Pancasila Sebagai Sistem Etika.
- d. Untuk Mengetahui Esensi Dan Urgensi Pancasila Sebagai Sistem Etika.

PEMBAHASAAN

Alasan Diperlukannya Pancasila Sebagai Sistem Etika

Etika pada hakikatnya adalah mengamati realitas moral secara kritis. Sementara objek etika menurut Franz Magnis-Suseno adalah pernyataan moral. Moral berarti mengacu kepada baik buruknya manusia sebagai manusia. Sehingga dapat dikatakan etika adalah sebuah refleksi kritis dan moral yang menentukan dan terwujud dalam sikap dan pola perilaku hidup manusia, baik secara pribadi tentang baik dan buruknya perilaku tersebut.

Pancasila merupakan sebuah sistem etika yang dapat diartikan Pancasila menjadi pedoman moral. Dengan kata lain, bangsa Indonesia seharusnya menemukan diri dalam Pancasila. Maksudnya, Pancasila menjadi penunjuk jalan, menjadi sarana orientasi yang menunjukkan kearah mana gerak perjalanan, bagaimana manusia Indonesia harus hidup, mengatur perbuatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹

Perlu mengetahui bahwa Pancasila sebagai sistem etika tidaklah muncul begitu saja. Pancasila sebagai sistem etika diperlukan dalam kehidupan politik untuk mengatur sistem penyelenggaraan negara. Jika bayangkan apabila dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara tidak ada sistem etika yang menjadi *guidance* atau tuntunan bagi para penyelenggara negara, niscaya negara akan hancur.

Beberapa alasan mengapa Pancasila sebagai sistem etika itu diperlukan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia, meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Generasi muda yang tidak mendapat pendidikan karakter yang memadai dihadapkan pada pluralitas nilai yang melanda Indonesia sebagai akibat globalisasi sehingga mereka kehilangan arah. Dekadensi moral itu terjadi ketika pengaruh globalisasi tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi justru nilai-nilai dari luar berlaku dominan.

Contoh-contoh dekadensi moral, antara lain: penyalahgunaan narkoba, kebebasan tanpa batas, rendahnya rasa hormat kepada orang tua, menipisnya rasa kejujuran, tawuran di kalangan para pelajar. Kesemuanya itu menunjukkan lemahnya tatanan nilai moral dalam kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sistem etika diperlukan kehadirannya sejak dini, terutama dalam bentuk pendidikan karakter di sekolah-sekolah.

2. korupsi akan merajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Para penyelenggara negara tidak dapat membedakan batasan yang boleh dan tidak, pantas dan tidak, baik dan buruk (*good and bod*). Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan pemahaman atas kriteria baik (*good*) dan buruk (*bod*). *Archie Bahm* dalam *Axiology of Science*, menjelaskan bahwa baik dan buruk merupakan dua hal yang terpisah. Namun, baik dan buruk itu eksis dalam kehidupan manusia, maksudnya godaan untuk melakukan perbuatan buruk selalu muncul. Ketika seseorang menjadi pejabat dan mempunyai peluang untuk melakukan tindakan buruk (korupsi, maka hal tersebut dapat terjadi pada siapa saja. Oleh karena itu, simpulan *Archie Bahm*, "Maksimalkan kebaikan, minimalkan keburukan".
3. Kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Hal tersebut terlihat dari kepatuhan pajak yang masih rendah, padahal peranan pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat dalam membiayai APBN. Pancasila sebagai sistem etika akan dapat mengarahkan wajib pajak untuk secara sadar memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. Dengan kesadaran pajak yang tinggi maka program pembangunan yang tertuang dalam APBN akan dapat dijalankan dengan sumber penerimaan dari sektor perpajakan.
4. pelanggaran hak-hak asasi manusia (HAM) dalam kehidupan bernegara di Indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak pihak lain. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilaporkan di berbagai media, seperti penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga (PRT), penelantaran anak-anak yatim oleh pihak-pihak yang seharusnya melindungi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan lain-lain Kesemuanya itu menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika belum berjalan maksimal. Oleh karena itu, di samping diperlukan sosialisasi sistem etika Pancasila, diperlukan pula penjabaran sistem etika ke dalam peraturan perundang-undangan tentang HAM.
5. Kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan datang, global

warming, perubahan cuaca, dan lain sebagainya. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa kesadaran terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika belum mendapat tempat yang tepat di hati masyarakat.

Masyarakat Indonesia dewasa ini cenderung memutuskan tindakan berdasarkan sikap emosional, mau menang sendiri, keuntungan sesaat, tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan dari perbuatannya. Contoh yang paling jelas adalah pembakaran hutan di Riau sehingga menimbulkan kabut asap. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sistem etika perlu diterapkan ke dalam peraturan perundang-undangan yang menindak tegas para pelaku pembakaran hutan, baik pribadi maupun perusahaan yang terlibat.

Sumber Historis, Sosiologis, Politis Tentang Pancasila Sebagai Sistem Etika

1. Sumber Historis

Sejarah Pancasila sejak zaman kerajaan di tanah air memang kental terkait dengan warisan etika yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Sejarah Pancasila memang merupakan sebuah warisan idiom bangsa Indonesia yang unik dan adiluhung. Pancasila merupakan sebuah nilai yang lahir dari warisan leluhur bangsa Indonesia yang sangat menjunjung tinggi Ketuhanan, persatuan, keadilan dan musyawarah mufakat.

2. Sumber Sosiologis

Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Misalnya, orang saja bagaimana aturan dan tata etika orang Jawa yang sangat kental yang merupakan warisan dari leluhur masa lalu. Etika Jawa berperan sangat penting dalam pembentukan jati diri orang Jawa itu sendiri. Sehingga masih kita warisi hingga kini misalnya bagaimana kultur orang Jawa wilayah di Yogyakarta yang sangat menjunjung tinggi adab budaya dan tata krama.

Selain itu, warisan sosiologis juga dapat ditemui di Bali dengan sistem adat dan subak yang telah diwarisi sejak ratusan lalu. Kini, sistem adat dan subak di Bali tetap ajeg dan lestari meskipun menghadapi gempuran dan juga terpaan arus modernisasi dewasa ini.

3. Sumber Politis

Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar (Grundnorm) sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundangan-undangan di Indonesia. Hans Kelsen mengatakan bahwa teori hukum itu suatu norma yang berbentuk piramida. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatannya dari suatu norma yang lebih tinggi.

Semakin tinggi suatu norma, akan semakin abstrak sifatnya, dan sebaliknya, semakin rendah kedudukannya, akan semakin konkrit norma tersebut.

Pancasila sebagai sistem etika merupakan norma tertinggi (*Grundnorm*) yang sifatnya abstrak, sedangkan perundang-undangan merupakan norma yang ada di bawahnya bersifat konkrit. Etika politik mengatur masalah perilaku politikus, berhubungan juga dengan praktik institusi sosial, hukum, komunitas, struktur-struktur sosial, politik, ekonomi. Etika politik memiliki 3 dimensi, yaitu tujuan, sarana, dan aksi politik itu sendiri. Dimensi tujuan terfokus dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat dan hidup damai yang didasarkan pada kebebasan dan keadilan. Dimensi sarana memungkinkan pencapaian tujuan yang meliputi sistem dan prinsip-prinsip dasar pengorganisasian praktik penyelenggaraan negara dan yang mendasari institusi-institusi sosial. Dimensi aksi politik berkaitan dengan pelaku pemegang peran sebagai pihak yang menentukan rasionalitas politik. Rasionalitas politik terdiri atas rasionalitas tindakan dan keutamaan. Tindakan politik dinamakan rasional bila pelaku mempunyai orientasi situasi dan paham permasalahan.

4. Dinamika Dan Tantangan Pancasila Sebagai Sistem Etika

a. Dinamika Pancasila Sebagai Sistem Etika

Argumen dinamika Pancasila sebagai sistem etika dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dapat diuraikan, sebagai berikut:

- i. Pada zaman Orde Lama, pemilu diselenggarakan dengan semangat demokrasi yang diikuti banyak partai politik, tetapi dimenangkan empat partai politik, yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Muslimin Indonesia (PARMUSI), Partai Nahdhatul Ulama (PNU), dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Tidak dapat dikatakan bahwa pemerintahan di zaman Orde Lama mengikuti sistem etika Pancasila, bahkan ada tuduhan dari pihak Orde Baru bahwa pemilihan umum pada zaman Orde Lama dianggap terlalu liberal karena pemerintahan Soekarno menganut sistem demokrasi terpimpin, yang cenderung otoriter.
- ii. pada zaman Orde Baru sistem etika Pancasila diletakkan dalam bentuk penataran P-4. Pada zaman Orde Baru itu pula muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Manusia Indonesia seutuhnya dalam pandangan Orde Baru, artinya manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang secara kodrati bersifat monodualistik,

yaitu makhluk rohani sekaligus makhluk jasmani, dan makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk pribadi memiliki emosi yang memiliki pengertian, kasih sayang, harga diri, pengakuan, dan tanggapan emosional dari manusia lain dalam kebersamaan hidup. Manusia sebagai makhluk sosial, memiliki tuntutan kebutuhan yang makin maju dan sejahtera.

- iii. sistem etika Pancasila pada era reformasi tenggelam dalam euforia demokrasi. Namun seiring dengan perjalanan waktu, disadari bahwa demokrasi tanpa dilandasi sistem etika politik akan menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan, serta *machiavelisme* (menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan).

b. Tantangan Pancasila Sebagai Sistem Etika

Beberapa bentuk tantangan terhadap sistem etika Pancasila, yaitu:

- i. tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Lama berupa sikap otoriter dalam pemerintahan sebagaimana yang tercermin dalam penyelenggaraan negara yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Hal tersebut tidak sesuai dengan sistem etika Pancasila yang lebih menonjolkan semangat musyawarah untuk mufakat.
- ii. tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Baru terkait dengan masalah NKK (Nepotisme, Kolusi, dan Korupsi) yang merugikan penyelenggaraan negara. Hal tersebut tidak sesuai dengan keadilan sosial karena nepotisme, kolusi, dan korupsi hanya menguntungkan segelintir orang atau kelompok tertentu.
- iii. tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada era Reformasi berupa euforia kebebasan berpolitik sehingga mengabaikan norma-norma moral. Misalnya, munculnya anarkisme yang memaksakan kehendak dengan mengatasnamakan kebebasan berdemokrasi.

5. Esensi Dan Urgensi Pancasila Sebagai Sistem Etika

a. Esensi Pancasila sebagai Sistem Etika

Hakikat Pancasila sebagai sistem etika terletak pada hal-hal sebagai berikut:

1. Hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. Artinya, setiap perilaku warga negara harus didasarkan atas nilai-nilai moral yang bersumber pada norma agama. Setiap prinsip moral yang berlandaskan pada norma agama, maka prinsip tersebut memiliki kekuatan (*force*) untuk dilaksanakan oleh pengikut-pengikutnya.

2. Hakikat sila kemanusiaan terletak pada *actus humanus*, yaitu tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral yang dibedakan dengan *actus homini*, yaitu tindakan manusia yang biasa. Tindakan kemanusiaan yang mengandung implikasi moral diungkapkan dengan cara dan sikap yang adil dan beradab sehingga menjamin tata pergaulan antarmanusia dan antarmakhluk yang bersendikan nilai-nilai kemanusiaan yang tertinggi, yaitu kebajikan dan kearifan.
3. Hakikat sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Sistem etika yang berlandaskan pada semangat kebersamaan, solidaritas sosial akan melahirkan kekuatan untuk menghadapi penetrasi nilai yang bersifat memecah belah bangsa.
4. Hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat. Artinya, menghargai diri sendiri sama halnya dengan menghargai orang lain.
5. hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan dari sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban semata (*deontologis*) atau menekankan pada tujuan belaka (*teleologis*), tetapi lebih menonjolkan keutamaan (*virtue ethics*) yang terkandung dalam nilai keadilan itu sendiri.

b. Urgensi Pancasila sebagai Sistem Etika

Hal-hal penting yang sangat urgen bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem etika meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara.
2. Pancasila sebagai sistem etika memberi guidance bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, regional, maupun internasional.
3. Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara sehingga tidak keluar semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancasila.
4. Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter untuk menyaring pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak globalisasi yang memengaruhi pemikiran warga negara.

PENUTUP

Kesimpulan

Alasan mengapa Pancasila diperlukan sebagai sistem etika: 1. Mengembangkan dimensi moral: Pancasila dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moral pada setiap individu agar mampu menampilkan spiritualitas dalam kehidupannya sebagai anggota masyarakat, bangsa, dan negara. 2. Memberikan pedoman : Pancasila berfungsi sebagai pedoman perilaku individu dalam masyarakat Indonesia. Di dalamnya terkandung nilai-nilai yang dapat membantu masyarakat hidup bersama secara aman dan harmonis. 3. Memerangi kerusakan moral: Pancasila diperlukan untuk memerangi kerusakan moral di masyarakat, seperti penyalahgunaan narkoba, tidak menghormati orang tua, dan ketidakjujuran. 4. Mencegah korupsi: Pancasila diperlukan untuk mencegah korupsi di kalangan pejabat negara. 5. Melindungi Hak Asasi Manusia: Pancasila diperlukan untuk melindungi hak asasi manusia di Indonesia. 6. Melestarikan lingkungan hidup : Pancasila diperlukan untuk melestarikan lingkungan hidup dan mencegah kerusakannya. Sumber Historis: Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai *Philosofische Grondslag* atau *Weltanschauung*. Artinya, nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral telah terdapat pandangan hidup masyarakat. Pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui penataran P-4 dan diinstitutionalkan dalam wadah BP-7.

Sumber Sosiologis: Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia.

Sumber politis: Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar (*Grundnorm*) sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Argumen tentang Dinamika Pancasila sebagai Sistem Etika Pertama, pada zaman Orde Lama, pemilu diselenggarakan dengan semangat demokrasi yang diikuti banyak partai politik, tetapi dimenangkan empat partai politik, yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Muslimin Indonesia (PARMUSI), Partai Nahdhatul Ulama (PNU), dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Kedua, pada zaman Orde Baru sistem etika Pancasila diletakkan dalam bentuk penataran P-4. Pada zaman Orde Baru itu pula muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Manusia Indonesia seutuhnya dalam pandangan Orde Baru, artinya manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang secara kodrati bersifat monodualistik, yaitu makhluk rohani sekaligus makhluk jasmani, dan makhluk individu sekaligus makhluk sosial.

Urgensi Pancasila sebagai sistem etika adalah Pancasila sebagai sumber nilai dan norma, dasar integrasi nasional, dan landasan moral.

Saran

Dalam penulisan makalah ini kami menyadari ini masih jauh dari dan ketentuannya, banyak sekali kekurangan dan pembuatan makalah karena hanya milik Allah SWT, oleh sebab itu kami kritik dan saran kepada dosen dan semua kami juga makalah yang sangat untuk penulis dan pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, A., & Trisno, B. (2019). Menelusuri Pancasila. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Paristiyanti Nurwardani, et al. (2016). Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Indonesia Prime.
- Purnomo, I. M. B. A. (2020). Buku Ajar: Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi. Bali: Yayasan Mertajati Widya Mandala.
- Yusuf Setyadi, et al. (2024). Pendidikan Pancasila. Jawa Barat: Adanu Abimata.
- Zaenuddin, & Tantowi, A. (2022). Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi. Jawa Timur: Ekysystika Press.